

Vol. 13 No. 02-Mei 2009



ISSN. 1411 - 0261

# **D I S I P L I N**

*Majalah Civitas Akademika  
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda  
Palembang*

## DAFTAR ISI

Majalah DISIPLIN Vol. 13 No. 02 - Mei 2009

## Halaman

- Dari Redaksi .....	i
- Daftar Isi .....	ii
 1. <b>Konstitusi Dan Pengaruh Dalam Kehidupan Bernegara</b> Oleh : Fatria Khairo, S.TP., SH., MH. ....	 1 - 9
2. <b>Fungsi Visum et Repertum Pemeriksaan Bedah Mayat (Otopsi) Di Sidang Pengadilan</b> Oleh : Liza Deshaini, SH., M.Hum. ....	10 - 15
3. <b>Penegakan Hukum Di Tengah Krisis Moral Politisi Dan Birokrasi Di Indonesia</b> Oleh : Hendri S .....	16 - 20
4. <b>Konstelasi Politik Pra Pelaksanaan Dan Pasca Pemilu Legislatif 2009</b> Oleh : Tarudin, SH., M.Hum. ....	21 - 25
5. <b>Penyelesaian Sengketa Perjanjian Asuransi Melalui Media Non-Litigasi (Alternative Dispute Resolution-ADR).</b> Oleh : Derry Angling Kesuma .....	26 - 30
6. <b>Transisi Politik Menuju Demokrasi</b> Oleh : Yuli Asmara Triputra, SH., M. Hum. ....	31 - 35
7. <b>Mahkamah Konstitusi Jangan Menjadi Penerap Hukum Yang Menerbitkan Putusan Menyesatkan Bangsa</b> Oleh : Prof. H. Abu Daud Busroh, SH. ....	36 - 38

isi diluar tanggung jawab percetakan



## TRANSISI POLITIK MENUJU DEMOKRASI

(Sebuah intisari serta komentar terhadap tulisan Satya Arinanto dalam buku *"Hak Asasi Manusia Dalam Transisi Politik di Indonesia"*)

Oleh :

Yuli Asmara Triputra, SH., M. Hum.

### I. Intisari

Belakangan ini telah terjadi suatu transisi di beberapa negara dunia. Transisi yang dipelopori oleh kaum reformis dimaksud ialah suatu visi menuju kepada negara-negara demokrasi dan meninggalkan pemerintahan masa lalu yang bersifat otoriter atau totaliter. Hal ini disebabkan karena suatu negara yang totaliter tidak hanya sekedar mengontrol kehidupan masyarakat dengan ketat dan mempertahankan dengan tegas sebuah kekuasaan sebuah elit politik kecil yang despotik, ia juga bukan sekedar rezim seorang diktator yang haus kuasa. Dengan demikian, negara totaliter adalah sebuah sistem politik yang dengan melebihi bentuk-bentuk kenegaraan despotik tradisional secara menyeluruh mengontrol, menguasai, dan memobilisasikan segala segi kehidupan masyarakat. Penguasa totaliter tidak hanya mau memimpin tanpa gangguan dari bawah, ia tidak hanya mau memiliki monopoli kekuasaan. Ia justru mau secara aktif menentukan bagaimana masyarakat hidup dan mati; bagaimana mereka bangun tidur, makan, belajar dan bekerja. Ia juga mau mengontrol apa

yang mereka pikirkan; dan siapa yang tidak ikut, akan dihancurkan. Sebagai contoh dua rezim totaliter yang paling kondang adalah pemerintahan Nasional-sosialisme (Nazi) dibawah kekuasaan Adolf Hitler (1933-1945) di Jerman dan dalam kekuasaan *Bolshevisme Soviet* dibawah Jossif W. Stalin (1922-1953).

Menurut Huntington, sesungguhnya rezim otoritarian, apapun tipenya, mempunyai kesamaan dalam satu hal; hubungan sipil militer mereka tidak begitu diperhatikan. Dalam rezim militer tidak ada kontrol sipil dan pemimpin serta organisasi militer sering melakukan fungsi yang luas dan bervariasi yang jauh dari misi militer yang normal. Dalam kediktatoran personal, penguasa melakukan apa saja untuk memastikan bahwa militer disusupi dan dikontrol oleh kaki tangan dari kroni-kroninya, yang memecah belah dan bekerja untuk menjaga cengkraman kekuasaan diktator. Dalam pemerintahan satu partai, hubungan sipil militer tidak begitu berantakan, tetapi militer dipandang sebagai instrumen dari partai; pejabat militer harus merupakan anggota partai; komisar politik dan unsur-unsur partai paralel dengan rangkaian komando militer, dan loyalitas tertingginya lebih diutamakan kepada partai daripada kepada negara.

Dalam sistem monarki tradisional, militer hanyalah berperan sebagai semacam "penjaga malam" (*nacht wachter staat*), atau yang dalam sistem pemerintahan modern disebut sebagai fungsi pertahanan keamanan (hankam). Fungsi inilah yang dibedakan secara

tajam dengan fungsi sipil yang mencakup seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, kecuali hankam.

Dalam negara-negara maju seperti Amerika Utara dan Eropa Barat, pemetaan kedua fungsi militer dan sipil tersebut sudah bisa berjalan seimbang. masing-masing bisa berperan sesuai fungsinya, tidak tumpang tindih dan intervensi. Kalaupun ada pengaruh, maka sipil mempengaruhi militer, dan bukan sebaliknya. Karena yang berjalan adalah prinsip "supremasi sipil" (*civilian supremacy*), maka kebijakan-kebijakan politik yang ditempuh dan dijalankan pemerintahan sipil berpengaruh pada langkah-langkah yang harus ditempuh militer.

Kondisi di Indonesia pada saat ini menunjukkan bahwa dominasi besar dan hegemonik dari militer pada masa Orde baru merupakan faktor struktur yang sangat sulit dinetralisir oleh kekuatan sipil. Apalagi jika rezim sipil, tidak mempunyai konsep yang tajam dan konsisten kuat untuk menetralsir militer. Kemampuan militer untuk melakukan pemulihan (*recovery*) jelas akan mengancam transisi demokrasi di Indonesia.

Belakangan ini, militer secara sistematis telah melakukan langkah-langkah untuk masuk ke dunia politik. Dengan demikian, kondisi yang ada pada saat ini terletak diantara dua alternatif; transisi menuju demokrasi atau pemulihan TNI. Sesungguhnya kemampuan militer untuk melakukan pemulihan bisa sdimgerti karena perilaku elemen sipil itu sendiri. Hal ini

terlihat bagaimana politisi sipil justru mengundang militer masuk ke dalam politik. Partai-partai politik tampaknya begitu gembira ketika para jenderal bergabung ke partainya.

Dalam konteks transisi menuju demokrasi di Indonesia, diperlukan reposisi hubungan sipil-militer dalam arti yang menyeluruh, dan tidak hanya terbatas pada bidang politik saja.

Tradisi politik dari beberapa negara transisi menunjukkan adanya kecenderungan untuk terjadinya pengulangan kejadian (dan hal ini akan terus terjadi ) oleh para politisi sipil yang menolak untuk menerima ketidakpastian dari proses demokrasi dan kemudian meminta bantuan kepada pihak militer untuk memberikan "alternatif-alternatif penyelesaian", dengan cara menyamarkan dirinya di balik penyuaaran harapan tentang pentingnya pengutamaan kepentingan nasional. Kenyataan yang ada di berbagai kasus menunjukkan bahwa pihak militer tidak akan melakukan intervensi jika tidak ada dukungan dari pihak sipil. Imaje tentang peranan pihak militer dan bagaimana manipulasi terhadap hal itu oleh kelompok sipil dapat ditransformasikan, merupakan salah satu kunci dari permasalahan-permasalahan pada masa transisi politik, dan merupakan suatu hal yang akan tetap bertahan dengan baik dalam fase konsolidasi demokrasi.

Pintu demokrasi yang terbuka lebar dengan tumbangnya rezim Orde Baru telah memaksa TNI untuk mengubah doktrin fundamentalnya, termasuk dwifungsi ABRI, yang selama ini dijadikan landasan untuk melegitimasi



kekuasaan politiknya. TNI tidak memiliki pilihan lain kecuali menyesuaikan diri dengan kondisi tersebut. Berdasarkan hal itu, mereka kemudian memformulasikan apa yang mereka sebut sebagai "Paradigma Baru" sebagai pedoman bagi aktivitas-aktivitas politik TNI.

Dalam formatnya yang orisinal, "Paradigma Baru" menyarankan agar militer tetap berperan dalam mempengaruhi perkembangan politik, tetapi tidak lagi memiliki aspirasi untuk mendominasi pemerintahan. Militer tetap akan melanjutkan upaya-upaya untuk memberikan pengaruh politik, namun pengaruhnya harus secara tidak langsung, tidak bersifat langsung. Dan militer harus berbagi kekuasaan dengan kelompok sipil. Istilah "kembali ke barak" yang sebelumnya sering terdengar, dihindari.

Berdasarkan "paradigma baru" tersebut, kelompok reformis yang berpandangan radikal berpendapat TNI hanya dapat diubah secara gradual. Dan untuk menuju ke arah itu, ada beberapa langkah-langkah dimaksud meliputi : 1) *reduction in military representation in the legislatures*, 2) *elimination of "kekaryaan" (secondment of military officers to civilian positions)*, 3). *political "neutrality"*, 4). *Separation of police from the military*, dan 5). *defence orientation*.

Dengan dilandasi oleh "lima langkah Reformasi TNI" tersebut, tampak bahwa kepemimpinan TNI yang baru telah menunjukkan dukungan terhadap demokratisasi dan secara berkala merujuk pada "supremasi sipil",

suatu terminologi yang selalu dihindari kelompok militer di masa lalu.

Proses transisi dari pemerintahan masa lalu yang otoritarian atau totaliter, membawa suatu permasalahan yang mendasar dan menjadi suatu pertanyaan yang haruslah dijawab, yakni tentang bagaimanakah tindakan masyarakat terhadap masa lalu ? haruskah masyarakat menghukum masa lalunya, ataukah membiarkan kaitan dengan masa lalu (*bygones*) tetap eksis ?

Menurut pengamatan Daan Bronkhorst, seorang mantan petinggi *Amnesty International*, dalam konteks keadilan dalam masa transisi ini terdapat beberapa parameter untuk menganalisis masalah-masalah yang berkaitan dengan keadilan transnasional. *Pertama*, adalah "kebenaran". *Kedua*, adalah rekonsiliasi, dengan alasan bahwa setiap masyarakat yang menjadi korban tindakan represif harus dipulihkan dari syarat-syarat penyelesaian substansial dari konflik dan kekacauan tersebut, ketiga adalah keadilan.

## II. Komentor

Pembicaraan di seputar transisi politik menuju demokrasi tidaklah dapat dilepaskan dari beberapa elemen penting yang terkait di dalamnya. Yang pertama ialah, tentang bagaimana mewujudkan suatu ide memunculkan suatu konsep negara baru yang demokratis sebagai pengganti daripada pemerintahan masa lalu yang bersifat otoritarianisme atau totaliter. Rezim terdahulu yang cenderung otoriter tersebut telah banyak menimbulkan kerugian dan bahkan pelanggaran HAM dalam upaya mempertahankan

kekuasaannya di panggung pemerintahan.

Selanjutnya yang kedua, dalam kaitannya dengan masa transisi ini yaitu bagaimana mereposisi hubungan sipil-militer. Hubungan sipil-militer hendaknya berjalan sebagaimana yang ada di negara industrial yang demokratis, atau yang disebut dengan istilah "kontrol sipil obyektif" (*objective civilian control*). Istilah ini mengandung hal-hal sebagai berikut; 1). profesionalisme militer yang tinggi dan pengakuan dari pejabat militer akan batas-batas profesionalisme yang menjadi bidang mereka, 2). subordinasi yang efektif dari militer kepada pemimpin politik yang membuat keputusan pokok tentang kebijakan luar negeri dan militer, 3). pengakuan dan persetujuan dari pihak pemimpin politik tersebut atas kewenangan profesional dan otonomi bagi militer, dan akibatnya, 4). minimalisasi intervensi militer dalam politik dan minimalisasi intervensi politik dalam militer.

Poin ketiga dalam kaitannya dengan transisi politik ini, yaitu perumusan kebijakan baru untuk menyelesaikan hubungan dengan rezim sebelumnya. rezim-rezim demokrasi baru telah mencari suatu pijakan untuk menjadikan mereka sebagai "negara bersih", yakni pencarian yang mengubur masa lalunya dan untuk mendahulukan segala bentuk pertanggungjawaban terhadap masalah tersebut. Sebagai contoh Chile misalnya, dimana pemerintahnya telah memilih sarana yang berbeda untuk berhubungan dengan masa lalunya, misalnya dengan membuka kebenaran dari pelanggaran-pelanggaran HAM dan dorongan terhadap

suatu pengakuan publik akan kejahatan-kejahatan dan bahkan suatu permintaan maaf terhadap para korban. walaupun pada awalnya muncul skeptisme terhadap pola-pola pengungkapan semacam itu, yang dikuatirkan akan menjurus ke arah instabilitas.

Menjawab permasalahan ini, ada baiknya bila bercermin pada perspektif filsafat Yunani, dimana terdapat tokoh yang bernama Solon yang berasal dari Athena (624-560 SM). Solon menarik karena ada berbagai unsur dalam kebijakan-kebijakan dan tindakan-tindakannya yang mencerminkan cara-cara pemerintahan modern dalam mencoba untuk mengadakan rekonsiliasi dengan masa lampau. Hal ini antara lain dapat terlihat dalam beberapa hal sebagai berikut. Pada tingkat pertama, berkaitan dengan masalah pemberian "perlindungan yang besar", bagi populasi penduduk. Langkah-langkah yang diambil Solon memberikan dasar bagi apa yang kini dinamakan sebagai kekuasaan hukum, termasuk instrumen-instrumen demokratis dari majelis rakyat dan pemeriksaan pengadilan yang adil. Disamping itu juga terhadap pihak-pihak yang paling lemah, misalnya anak-anak. Kedua, masyarakat baru memerlukan tatanan sosial baru. Ketiga, berkaitan dengan penanganan masa lampau, adalah salah untuk menghina pihak-pihak yang dulu kaya dan sangat berkuasa. Penghinaan dapat dengan mudah menimbulkan serangan balasan dan upaya elit ekonomi atau militer sebelumnya untuk memperoleh kembali kekuasaan mereka. lagi pula, di sebagian negara-negara yang sedang mengalami



proses transisi, pengetahuan dan sumber-sumber daya dari elit terdahulu merupakan bahan-bahan yang esensial dalam proses rekonstruksi. Keempat, mungkin penegasan Solon untuk melakukan pemihakan bukan merupakan suatu hal yang sama sekali tidak beralasan. Pada prinsipnya, setiap warga negara memang dipaksa untuk berpihak; apakah mendukung otoritas atau melakukan perlawanan terhadapnya.

Poin yang terakhir dalam era transisi yaitu demiliterisasi. Referensi terhadap militer ini mengingatkan pada suatu titik krusial; demiliterisasi bukan merupakan masalah yang hanya

terkait dengan militer.

Indonesia sebagai salah satu negara otoritarian yang didukung oleh kekuatan militer (TNI) mengharuskan TNI melakukan reformasi ke dalam tubuhnya. Hal ini dikenal dengan "paradigma baru" dengan "lima langkah reformasi TNI" untuk mengimplementasikannya. Dengan dilandasi oleh "lima langkah reformasi TNI" tersebut, tampak bahwa kepemimpinan TNI yang baru telah menunjukkan dukungan terhadap demokratisasi dan secara berkala merujuk kepada "supremasi sipil".